

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI
MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP
PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS
PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Irene Fransisca Liemanto

NIM. 145010101111037



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA
RATIFIKASI *MINAMATA CONVENTION ON MERCURY*
TENTANG PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA
DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK
LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS
PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL**

Identitas penulis :

- a. Nama : Irene Fransisca Liemanto**
- b. NIM : 145010101111037**
- Konsentrasi : Hukum Internasional**

Jangka waktu penelitian :

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agis Ardhiansyah, S.H., LLM

Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn

NIP. 19840313 200912 1 001

NIP. 19850101 200912 2 005

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum

NIP. 19780811 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI
MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP
PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS
PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL**

Oleh:

Irene Fransisca Liemanto

145010101111037

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agis Ardhiansyah, S.H., LLM
M.Kn

NIP. 19840313 200912 1 001

Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H.,

NIP. 19850101 200912 2 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP.19620805 198802 1 001

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum
NIP. 19780811 200212 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat, kasih dan berkatnya yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini**
- 2. Kedua Orang tua dan kakak serta adik yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material**
- 3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
- 4. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional**
- 5. Bapak Agis Ardhiansyah, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
- 6. Ibu Dr. Patricia Audrey, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya**
- 7. Ibu Anis dan Ibu Misinah yang telah menjadi orang tua selama di Malang**
- 8. Teman – teman Omnivora, Primavera Dian, Anggi Wiyani, Tyas Dwi yang telah memberikan semangat dan dukungan**
- 9. Teman – teman CG Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan spiritual**
- 10. Lydia Agustina sebagai penyemangat dan pendukung**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Perjanjian Internasional.....	17
B. Asas – asas dalam Perjanjian Internasional.....	24
C. Proses berlakunya Perjanjian Internasional dalam Suatu Negara.....	25
D. Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional.....	26
E. Penafsiran Perjanjian Internasional.....	28
F. Ratifikasi.....	29
G. Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	29
H. Minamata Convention on Mercury.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
F. Definisi Konseptual.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Konsekuensi hukum bagi Indonesia pasca ratifikasi Minamata Convention on Mercury.....41
- B. Perlindungan hukum yang harus disediakan oleh Indonesia terhadap dampak lepasan merkuri dari aktivitas pertambangan emas skala kecil...56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....66
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku / Literatur.....68
- B. Jurnal.....69
- C. Perjanjian Internasional.....70
- D. Peraturan Perundang – Undangan.....70
- E. Internet.....71

RINGKASAN

Irene Fransisca Liemanto, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, KONSEKUENSI HUKUM BAGI INDONESIA PASCA RATIFIKASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI DAMPAK LEPASAN MERKURI DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL, Agis Ardhiansyah, S.H, LLM, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H, M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Pasca Ratifikasi Minamata Convention On Mercury Tentang Perlindungan Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lepasannya Merkuri Dari Aktivitas Pertambangan Emas Skala Kecil. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan ratifikasi terhadap Konvensi Minamata yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang dimana penggunaan merkuri terbesar di Indonesia ada dalam aktivitas pertambangan emas skala kecil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah :
1. Apa konsekuensi hukum bagi Indonesia pasca ratifikasi Minamata Convention on Mercury ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang harus disediakan oleh Indonesia terhadap dampak lepasan merkuri dari aktivitas pertambangan emas skala kecil ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa karena Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Minamata, maka sebaiknya dilakukan perubahan terhadap Undang – Undang yang berkaitan dengan merkuri terutama untuk Undang – Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur terkait Pertambangan Rakyat agar isi dari Konvensi Minamata khususnya yang terkait tentang pertambangan emas secara buatan dan kecil dapat berlaku di Indonesia. Kemudian diikuti dengan melakukan pendataan jumlah pertambangan rakyat / pertambangan emas skala kecil dan menyiapkan alternatif bahan lain sebagai pengganti penggunaan merkuri.

SUMMARY

Irene Fransisca Liemanto, International Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, March 2018, LEGAL CONSEQUENCES FOR INDONESIA POST RATIFICATION MINAMATA CONVENTION ON MERCURY ON HUMAN HEALTH PROTECTION AND ENVIRONMENT AS IMPACT OF MERCURY RELEASE FROM SMALL SCALE MINING ACTIVITY, Agis Ardhiyansyah, SH, LLM, Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H, M.Kn.

In this thesis, the authors raised the issue of the Legal Consequences for Indonesia Post Ratification Minamata Convention On Mercury About Protection Of Human Health And The Environment On The Impact Of Mercury Release From Small Scale Mining Activity. The choice of the title was due to the ratification of the Minamata Convention by the Government of Indonesia where the largest use of mercury in Indonesia is in small-scale gold mining activities.

Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: 1. What are the legal consequences for Indonesia after the ratification of Minamata Convention on Mercury? 2. What legal protection should Indonesia provide for the impact of mercury release from small-scale gold mining activities?

Then the writing of this paper using the method of juridical normative with statute approach. The primary, secondary, and tertiary law materials obtained by the authors will be analyzed by using qualitative descriptive analysis techniques because the researcher wants to describe the facts or the apparent condition or phenomenon which is used as the reference in solving the legal problem which becomes the object of the study.

From the results of the research with the above method, the authors obtain the answer to the existing problems that because Indonesia has done ratification of Minamata Convention, it is better to make changes to the Law relating to mercury, especially for the *Undang – Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* which set about *Pertambangan Rakyat* so that the contents of the Minamata Convention in particular concerning artificial and small gold mining may apply in Indonesia. Then followed by the data collection of small-scale mining / small-scale mining and preparing alternative materials as a substitute for the use of mercury.